

## Relasi FPI dengan Dayah dalam Penegakan Syari'at Islam di Aceh

Zahlul Pasha Karim 

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Korespondensi: [zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id](mailto:zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Info Publikasi:**

Artikel Kajian Literatur

**Sitasi Cantuman:**

Pasha Karim, Zahlul. (2020). Relasi FPI dengan Dayah dalam Penegakan Syari'at Islam di Aceh. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(3), 227-237.

**DOI:** [doi.org/10.22373/jsai.1i3.789](https://doi.org/10.22373/jsai.1i3.789)

**Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh JSAI**

**Dikirim:** November 2020

**Diterima:** November 2020

**Dipublikasi:** November 2020

### ABSTRACT

*This article attempts to answer why FPI's relationship with Dayah in Aceh is so close. This condition is seen in contrast to several other areas in Indonesia that are seen to experience frequent collisions. This article shows that the relations between FPI and Dayah groups in Aceh occurred for several reasons: first, the FPI organization in Aceh was led by Dayah people and used the Dayah santri network as a mass base. When FPI entered Aceh, the idea was rejected by some senior Acehnese scholars. After FPI succeeded in approaching young people from the Dayah circles, such as Muslem Attahiry, FPI's progress was seen to be very strong and succeeded in establishing its influence in some Dayah. Second, FPI in Aceh has the right space on the issue they are raising, namely Islamic Syari'at. Politicians who need an image of taking sides with shari'ah need to use FPI, either directly or indirectly. Third, the character of Acehnese people who are fanatical and like religious symbols so they don't care less about FPI's background. The people of Aceh will accept it as long as they (FPI) wrap their actions and agendas with narratives and religious symbols.*

**Keywords:** FPI, Dayah, Syari'at Islam

## Abstrak

Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa hubungan FPI dengan Dayah di Aceh sangat dekat. Kondisi ini terlihat kontras dengan beberapa daerah lain di Indonesia yang terlihat sering mengalami benturan. Artikel ini menunjukkan bahwa relasi FPI dengan kalangan Dayah di Aceh terjadi karena beberapa sebab: pertama, organisasi FPI di Aceh dipimpin oleh orang Dayah dan menggunakan jaringan santri Dayah sebagai basis massa. Awal FPI masuk ke Aceh, idenya sempat ditolak oleh sejumlah ulama senior Aceh. Setelah FPI berhasil mendekati orang-orang muda dari kalangan Dayah, seperti Muslem Attahiry, kiprah FPI terlihat amat kuat dan berhasil menancapkan pengaruhnya di sejumlah Dayah. Kedua, FPI di Aceh memiliki ruang yang tepat pada isu yang mereka angkat, yaitu syari'at Islam. Politisi yang perlu citra keberpihakan pada syari'at perlu menggunakan FPI, baik secara langsung atau tidak langsung. Ketiga, karakter masyarakat Aceh yang fanatik dan menyukai simbol-simbol keagamaan sehingga kurang peduli dengan latar belakang FPI. Masyarakat Aceh akan menerima sejauh mereka (FPI) membungkus aksi dan agenda mereka dengan narasi-narasi dan simbol-simbol agama.

*Kata kunci: FPI, Dayah, Syari'at Islam*

\*\*\*

### A. Pendahuluan

Sejak formalisasi syari'at Islam di Aceh dilakukan, yang ditandai dengan pembentukan Qanun (Peraturan Daerah), ada banyak sekali kritik yang muncul, baik melalui jalur formal (kampus, forum-forum ilmiah) maupun jalur non-formal (media massa, NGO). Umumnya, berbagai unsur tersebut mengarahkan kritik pada beberapa hal utama, di antaranya: proses pelaksanaan syari'at Islam tidak partisipatoris dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, qanun-qanun yang dirumuskan tidak responsif terhadap masalah yang penting dan mendesak, dan syari'at Islam yang diformalkan dalam qanun kebanyakan mengatur hal-hal domestik dan menjadi urusan privasi seseorang (Andini, 2016).

Di luar dari itu, ada pula kelompok masyarakat yang mengkritisi pemerintah yang tidak serius dalam penegakan syari'at Islam. Kelompok ini biasanya secara reaktif menunjukkan ketidakpuasan mereka dalam menanggapi hasil pelaksanaan syari'at Islam. Jika kelompok masyarakat pertama berisikan unsur akademisi dan aktivis hak asasi manusia, maka kelompok kedua terdiri atas unsur kalangan dayah (pesantren tradisional). Bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI), kelompok ini bahkan tidak segan-segan melakukan aksi radikal sepihak dalam rangka memperjuangkan penegakan syari'at Islam. Beberapa aksi "main hakim sendiri" seringkali ditunjukkan oleh kelompok tersebut.

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengulas relasi antara FPI dengan kalangan dayah di Aceh dalam penegakan syari'at Islam. Kehadiran FPI di Aceh menunjukkan realitas yang berbeda dengan daerah-daerah di provinsi lain di Indonesia. Di beberapa

daerah, kehadiran kelompok tersebut seringkali mendapat penolakan dari masyarakat dan otoritas agama setempat akibat aksi vigilante yang kerap mereka lakukan dengan dalih "*amar ma'ruf nahi munkar*". Sementara di Aceh, kehadiran FPI mendapat sambutan hangat terutama oleh kalangan dayah. Beberapa dayah di Aceh yang memiliki hubungan erat dengan FPI terletak di kawasan Aceh Utara, yakni dayah Pasa Pasi, Darul Mujahidin, Babah Buloh, Julok dan Nisam. Lantas, bagaimana FPI mampu mencuri hati kalangan dayah di Aceh, bahkan dalam beberapa kesempatan kedua kelompok ini sering melakukan razia-razia penegakan syari'at Islam secara bersama-sama? Apakah hal itu ada kaitannya dengan model keislaman FPI dan kalangan dayah yang fundamentalis?

Adapun pembahasan diarahkan pada sejarah singkat FPI di Indonesia, kiprah mereka selama ini, dan masuknya gerakan tersebut ke Aceh hingga penerimaannya oleh kalangan dayah. Selanjutnya, dibahas pula beberapa aksi kerja sama antara FPI dengan kalangan dayah dalam penegakan syari'at Islam, agenda aksi, dan hal-hal yang melatari agenda tersebut.

## B. Pembahasan

Secara ringkas dijelaskan Bruinessen bahwa FPI adalah gerakan yang ingin mendorong diberlakukannya norma moral Islam, dan sebagian lagi adalah soal perbekingan (Bruinessen, 2014). Dipimpin oleh "Habib" Rizieq Shihab dan orang Arab Jakarta, yang punya hubungan dekat dengan para politisi, orang-orang di kepolisian dan juga bos para mafia hitam, FPI tersohor karena aksi main hakim sendiri dengan merazia klub malam, bar, dan sarang kegiatan ilegal lainnya. Aksi penggerebakan yang mereka lakukan itu tampak sebagian besar terdiri dari preman jalanan, beberapa didatangkan dari Banten atau bahkan Lampung untuk keperluan itu.

Sementara Wilson, dengan mengutip beberapa laporan mengemukakan bahwa FPI awalnya didirikan untuk menjadi basis dukungan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang saat itu diketuai Hamzah Haz, mengikuti model organisasi Banser yang merupakan sayap paramiliter NU (I. Wilson, n.d.). Meskipun pimpinan mereka terdiri dari ulama-ulama bergelar habib dan kiai-kiai Betawi, keanggotaan mereka terdiri dari pemuda miskin di daerah Jakarta Pusat seperti Tanah Abang.

Adapun dayah merupakan lembaga pendidikan keislaman tertua di Aceh. Banyak ulama karismatik yang lahir dari dayah. Bahkan menurut Siegel sebagaimana dikutip Hamdiah, dayah telah ada semenjak era kesultanan Aceh dan mewarnai kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan memainkan fungsi sosial yang kuat di tengah-tengah masyarakat (Latif, 2007). Dayah diyakini oleh masyarakat Aceh pertama kali digunakan di sudut masjid Madinah ketika Nabi Muhammad mengajar para sahabat pada masa awal Islam (Amiruddin, 2008). Penghormatan masyarakat Aceh sebagai institusi dipengaruhi oleh figur ketokohan sang pemimpinnya. Pembelajaran agama Islam di dayah menekankan pada paham *ahlussunnah wal-jama'ah* dan *fiqh syafi'iyah*.

Dayah di Aceh dikenal dengan sikap apolitisnya. Namun belakangan, sikap demikian semakin kabur seiring menguatnya intervensi pemerintah terhadap dayah (Muslimin, 2014). Karenanya, seorang ulama dayah selalu memosisikan diri sebagai tempat bertanya bagi pemerintah (umara). Ada adagium bahwa "*pemerintah jak seutot ulama u dayah*" (pemerintahlah yang seharusnya menemui ulama ke dayah). Adagium ini ingin menjamin agar dayah tidak terkontaminasi oleh urusan politik yang akan meruntuhkan kredibilitas dayah secara keseluruhan (Lhokseumawe, 2018). Bahkan ulama bisa mengintervensi pemerintah jika memang kebijakan mereka tidak sejalan dengan apa yang dipahami pihak dayah. Pandangan ini tampaknya yang kemudian hari melatari kalangan dayah bergerak karena menyaksikan implementasi syariat Islam yang cenderung menurun di tengah pemerintah.

Dari sisi historis, kehadiran FPI di Aceh pada awalnya mendapat penolakan dari pimpinan sejumlah kalangan dayah. Marzi Afriko mencatat, Habib Rizieq selaku pimpinan pusat FPI pernah beberapa kali datang ke Aceh pasca musibah tsunami dan menjumpai para tokoh dayah, termasuk Waled Nuruzzahri/Waled Nu (Afriko, 2010). Namun, misinya membangun jaringan lokal di Aceh gagal, karena sejumlah pimpinan dayah belum dapat menerima kehadiran FPI, salah satu alasannya karena rumor tentang keberadaan TNI di balik FPI agaknya menjadi perhatian dan alasan utama yang mendasari kekhawatiran itu, selain juga demi memelihara perdamaian Aceh (I. D. Wilson, 2018).

Gagal masuk melalui kaum tua, FPI mengalihkan perhatiannya mencari dukungan dari orang-orang muda di kalangan dayah yang seide dengan mereka. Abu Jihad, sebagai perwakilan personal FPI di Aceh membuka akses dan mempermudah jalan meraih dukungan mewujudkan rencana mendirikan FPI di Aceh lewat cara menjalin kerja sama dengan Tgk. Muslim At-Thahiry dan Tgk. Jalaluddin. Hubungan Abu Jihad dengan kedua tokoh tersebut mudah terjalin erat karena di antara mereka masing-masing memiliki persepsi yang sama mengenai pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Khusus mengenai Tgk. Muslim At-Thahiry memang dikenal sebagai pimpinan Dayah Darul Mujahidin, Aceh Utara, yang sebelum bergabung dengan FPI pun sering melakukan gerakan anti maksiat bersama para santrinya di wilayah Aceh Utara. Ada kalanya, aksi itu dilakukannya secara sendiri bersama santrinya, ada pula melibatkan pimpinan dan santri dayah lain di bawah asuhan Tgk. Jalaluddin. Baik Tgk. Muslim At-Thahiry dan Tgk. Jalaluddin pernah belajar (nyantri) pada dayah yang sama, yakni dayah Babah Buloh, Aceh Utara.

Di antara aksi yang pernah dilakukan oleh kedua orang itu bersama santrinya adalah sweeping busana yang dilakukan mulai dari jalan kecamatan hingga jalan provinsi Medan-Banda Aceh. Ada pula aksi mobilisasi santri untuk menggagalkan

penggunaan keyboard dan nyanyian pada acara perpisahan siswa SMAN 1 Dewantara. Selain itu, Tgk. Muslim At-Thahiry dan Tgk. Jalaluddin juga dengan menerjunkan santri untuk melakukan aksi penertiban maksiat di Pantai Rancong 23 April 2007 dan Pantai Hagu dan Ujong Blang pada tanggal 26 Juni 2006. Lokasi-lokasi wisata ini berada di wilayah kota Lhokseumawe. Aksi serupa juga dilakukan oleh santri dayah Paya Pasii di kota lainnya, seperti Pantai Kuala Beukah dan Kuala Peurelak, yang kerap didatangi siswa-siswi.

Berbagai aksi itu menunjukkan sesungguhnya ada kesamaan mendasar antara FPI dengan beberapa kalangan dayah di Aceh. Kesamaan itu terletak pada agenda yang diperjuangkan oleh FPI dengan kalangan dayah tersebut, yakni agenda penegakan syari'at Islam. Slogan paling terkenal FPI terkait hal itu adalah apa yang paling sering dikemukakan Rizieq Shihab, "NKRI Bersyari'ah" (Sebastian & Arifianto, 2018). Sementara kalangan dayah menilai bahwa pelaksanaan syari'at Islam di Aceh merupakan identitas masyarakat Aceh yang tidak boleh diabaikan apalagi dilemahkan. Sehingga segala aksi mereka meskipun berbentuk main hakim sendiri diyakini sebagai usaha meneguhkan identitas itu dan upaya membantu aparat penegak hukum terutama Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, tidak mengherankan tatkala FPI dapat diterima begitu terbuka oleh kalangan dayah dikarenakan kedua kelompok ini memiliki agenda yang sama, yakni sama-sama berjuang dalam isu penegakan syari'at Islam.

FPI karena kelahirannya lebih bernuansa politis dibanding agama, secara organisasi kini telah mengembangkan sistem cabang secara nasional, di mana pimpinan pusat mereka terletak di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Aksi Jalanan telah digabungkan di tingkat pimpinan daerah dan pusat dengan membangun aliansi dan relasi patron-klien dengan elit politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, dukungan FPI terhadap calon presiden Prabowo Subianto masing-masing di tahun 2014 dan 2019 membuktikan kuatnya pengaruh mereka dalam memobilisasi massa untuk mendukung Prabowo (Fernandes, 2019; Fathy, 2019). Militansi mereka juga terbukti tatkala berhasil mengirim Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke dalam penjara terkait "kasus Al-Maidah" diiringi "aksi bela Islam" berjilid-jilid yang pada saat bersamaan sesungguhnya berusaha memuluskan jalan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 yang didukung Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. FPI tidak hanya berhasil mengirimkan Ahok ke penjara, namun juga berhasil mengantarkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menduduki posisi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 (Wildan, 2016; Ahyar & Alfitri, 2019).

Hal yang serupa sesungguhnya terjadi di Aceh. Kekuatan FPI beserta kalangan dayah seringkali digunakan elit politik di Aceh untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan (Syarif & Wahid, 2018). Tahun 2015 misalnya, di Banda Aceh ratusan massa yang menamakan dirinya Gerakan Aswaja melakukan demonstrasi di Banda Aceh. Salah

satu tuntutanannya adalah melarang Wahabi berkembang di Aceh. Wahabi sendiri merupakan salah satu gerakan tauhid yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 Masehi. Gerakan ini mengusung pemahaman bahwa ajaran Islam harus bersih dari bid'ah, takhayul, dan khurafat (Hanafi, 1995). Ajaran Muhammad bin Abdul Wahab merupakan ajaran pemurnian yang ingin mengembalikan Islam sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad setelah Islam dinilai mengalami kemunduran akibat berbagai penyimpangan yang membahayakan, terutama keimanan terhadap tauhid atau keesaan Tuhan, seperti pengkultusan terhadap ulama tertentu lewat ajaran tarikat, penyembahan pohon keramat, sajian makan dan pemujaan terhadap kuburan, melepas nazar di kuburan, dan pemujaan terhadap orang-orang mati.

Namun, sebagian besar kalangan dayah di Aceh yang berlandaskan pada model keislaman tradisional meyakini bahwa beberapa ajaran Wahabi telah menyimpang dari ajaran Islam (Al-Fairusy et al., 2020). Hal ini sangat meresahkan dan oleh karena itu perlu dikecam. Aceh bagi kelompok dayah tradisional tidak layak dihuni oleh Wahabi (Idris & Sahlan, 2018).

Selain FPI, Gerakan Aswaja ikut dimotori oleh beberapa organisasi berbasis santri dayah, yakni Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), dan Inshafuddin (Aceh Kita, 2019). Tuntutan massa kala itu diterima oleh Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Dalam kesempatan itu, Muzakir berjanji akan memenuhi tuntutan massa aksi dan mendorong tuntutan tersebut diperjuangkan oleh Pemerintah Aceh.

Dari sisi sosial-politik, aksi massa itu tidak terlepas dengan kondisi politik yang sedang terjadi di Aceh kala itu. Pada tahun-tahun tersebut, hubungan Muzakkir Manaf selaku Wakil Gubernur Aceh dengan Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh kala itu sedang panas-panasnya dan "tidak mesra". Dalam beberapa kali pemberitaan media massa, seringkali kedua pimpinan puncak Aceh itu berselisih paham dan bersitegang. Sementara di sisi lain, Muzakkir Manaf pun sedang mengonsolidasikan kekuatan politik untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh pada Pilkada 2017. Karenanya, aksi massa itu benar-benar dimanfaatkan oleh Muzakkir untuk menaikkan elektabilitasnya di kalangan dayah. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan peserta aksi hanya Muzakkir lah pemimpin Aceh yang paling mendukung syariat Islam. Dalam kesempatan itu, ia pun di daulat sebagai "Umar bin Khattab" akhir zaman (Serambinews, 2015).

Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan patron-klien antara elit politik di Aceh dengan kelompok agama yang diwakili oleh FPI dan kalangan dayah. Dalam hal ini, elit politik menganggap bahwa kedua kelompok tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencapai keinginan para elit politik meraih kekuasaan. Akibatnya, meskipun kedua kelompok tersebut seringkali melakukan aksi vigilante berbentuk razia-razia penegakan

syariat Islam yang ilegal, selama menjalin hubungan dengan elit politik, hal itu bukanlah suatu persoalan dan tidak dianggap sebagai tindakan yang membahayakan.

Elit politik di Aceh dalam kondisi ini mampu menciptakan hubungan klientelistik dengan FPI dan kalangan dayah. Konsep patron-klien sesungguhnya berangkat dari teori pertukaran sosial, bahwasanya ada ketidakseimbangan dalam masyarakat terhadap materi dan keadaan sosial yang menghasilkan perbedaan dalam kekuasaan (Fikri & Sukmajati, 2019). Dalam konsep pertukaran sosial, mensyaratkan salah satu di antara dua pihak yang melakukan pertukaran harus memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak lainnya, sedangkan pihak penerima tidak memiliki sumber daya yang sama nilainya untuk dipertukarkan dengan pihak pemberi. Sehingga satu-satunya cara untuk membalas pertukaran ini adalah dengan memberikan kepatuhan kepada pihak pemberi sumber daya tadi (Fadiyah & Zakiyah, 2018).

Hubungan patron-klien sesungguhnya adalah hubungan yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, di mana seorang individu yang lebih tinggi status sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan perlindungan dan/atau keuntungan kepada seseorang dengan status lebih rendah (klien) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan dukungan dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron. Ada pihak yang menjadi superior dengan kelebihan status sosial dan ekonominya, dan pihak yang menjadi inferior karena status sosial ekonominya lebih rendah. Orang-orang pada posisi sebagai inferior tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada kondisi seperti inilah sang patron membantu memenuhi kebutuhan kliennya dengan status dan sumber dayanya (Fadiyah & Zakiyah, 2018).

Dalam kasus Aceh di atas dapat dijelaskan, bahwa elit politik lah yang menjadi patron dengan menyediakan sumber daya memadai kepada FPI dan kalangan dayah untuk memuluskan agendanya meraih kekuasaan. Karenanya, tak jarang dalam setiap agenda politik kedua kelompok ini bersatu dan bersama-sama dengan elit politik melakukan kerja-kerja politik. Hal ini dapat dimaklumi, karena tatkala FPI dan kalangan dayah melakukan aksi razia-razia penegakan syariat Islam perlu adanya dukungan yang kuat dari unsur pemerintah agar aksi mereka yang bersifat "main hakim sendiri" (vigilante) dan termasuk kategori ilegal, tetapi tidak akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Sementara politisi memerlukan kekuatan kedua kelompok tersebut meraih simpati massa untuk kepentingan kekuasaan.

Selain memiliki agenda yang sama soal isu penegakan syariat Islam, relasi FPI dengan kalangan dayah tampaknya juga terbangun karena pengaruh karakter masyarakat Aceh yang lebih menyukai simbol-simbol keagamaan dibandingkan substansi ajarannya. Hal ini seturut dengan karakter FPI yang di tempat kelahirannya di

Jakarta lazim mempraktikkan hal serupa. Di Jakarta, FPI seringkali melakukan razia tempat maksiat, seperti klub malam, bar, dan sarang kegiatan ilegal lainnya. Tak jarang bahkan, FPI melakukan pengerusakan pada tempat-tempat tersebut. Hal ini sesuai dengan agenda FPI yang menginginkan tegaknya "*amar ma'ruf nahi munkar*" di Indonesia.

Sementara itu di Aceh, penegakan syariat Islam telah menemukan wujudnya lewat formalisasi syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun. Kalangan dayah tradisional yang tidak puas dengan penegakan syari'at Islam oleh institusi pemerintah kemudian menemukan momentumnya lewat masuknya FPI ke Aceh. Akhirnya, secara bersama-sama kedua kelompok ini bersimbiosis melakukan razia-razia syariat Islam.

Dalam pandangan Afriko, fanatisme ikut pula menjadi faktor penentu memperkuat solidaritas dan jaringan dua gerakan aksi ini (Afriko, 2010). Fanatisme itu lahir dari suatu kesamaan pandangan tentang ibadah jihad yang sangat tinggi dan paling besar di sisi Tuhan. Dalam konteks penerapan syariat Islam, jihad yang dimaksud adalah dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Kesamaan pandangan mereka terlihat dalam menginterpretasikan secara literal pesan hadis; "*man ra'a munkaran fa al-yughayyiruhu biyadihi...*" (barangsiapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya...) yang diinterpretasikan sebagai landasan kewajiban dakwah *amar ma'ruf* walaupun harus dengan menggunakan cara-cara kekerasan, apalagi di ujung hadis ini disebutkan "*...fa'in lam yastathi' fa bi qalbihi fahuwa adh'afu al-iman...*" (barang siapa yang tidak sanggup maka cukuplah di dalam hati dan itu selemah-lemah iman) yang dengan sendirinya membuat mereka tidak ingin terlihat sebagai manusia yang lemah di hadapan Tuhan (Afriko, 2010). Pesan-pesan religi inilah yang menantang mereka agar tidak menjadi manusia yang rendah di depan Allah karena mendiamkan setiap kemunkaran yang terjadi.

### C. Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedekatan FPI dengan kalangan dayah di Aceh terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

*Pertama*, secara organisasi, FPI di Aceh dipimpin oleh orang dayah dan menggunakan jaringan santri dayah sebagai basis massa. Hal ini terlihat tatkala pertama kali FPI masuk ke Aceh idenya ditolak oleh sejumlah ulama senior Aceh. Namun akhirnya, setelah berhasil mendekati orang-orang muda dari kalangan dayah, seperti Muslem At-Thahiry, kiprah FPI terlihat amat kuat dan berhasil menancapkan pengaruhnya di sejumlah dayah.

*Kedua*, FPI di Aceh memiliki ruang yang tepat pada isu yang mereka angkat, yaitu syari'at Islam. Politisi yang perlu citra keberpihakan pada syari'at perlu menggunakan FPI, baik langsung atau menunggang, hal ini terlihat dalam Parade Pencinta Aswaja



yang para pesertanya mengagung-agungkan Muzakkir Manaf sebagai pemimpin pro-Aswaja yang kala itu menjabat Wakil Gubernur Aceh 2012-2017 dan berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur pada periode berikutnya.

*Ketiga*, karakter masyarakat Aceh yang fanatik dan menyukai simbol-simbol keagamaan dan abai substansi ajaran agama, sehingga kurang peduli dengan latar belakang FPI sejauh mereka membungkus aksi dan agenda mereka dengan narasi-narasi dan simbol-simbol agama.

## Daftar Pustaka

- Afriko, M. (2010). Syariat Islam dan Radikalisme Massa: Melacak Jejak Awal Kehadiran FPI di Aceh. In *Serambi Mekkah yang Berubah* (p. 45). Pustaka Alvabet.
- Ahyar, M., & Alfitri, A. (2019). Aksi Bela Islam: islamic clicktivism and the new authority of religious propaganda in the millennial age in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.1-29>
- Al-Fairusy, M., Abdullah, I., & Zainuddin, M. (2020). Ambo Muhammadiyah, Munak Pesantren: The Moderate Islam Characteristics of the Coastal Community. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.2009>
- Amiruddin, M. H. (2008). *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*. Yayasan Pena.
- Andini, A. P. (2016). *Politik Hukum Pengaturan Syari'at Islam pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Analisis Perbandingan Memorandum of Understanding Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)* Tesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Bruinessen, M. van. (2014). Selayang Pandang Organisasi, Serikat, dan Gerakan Muslim Indonesia. In *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme* (p. 65). Mizan.
- Dina Fadiyah, & Umami Zakiyah. (2018). Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia. *Madani*, 10(2), 78.
- Fathy, R. (2019). GNPf MUI: Strategi Pembingkai dan Keberhasilan Gerakan Populis Islam di Indonesia. *ASKETIK*, 3(1), 29–45. <https://doi.org/10.30762/ask.v3i1.1180>
- Fernandes, A. (2019). Politik Identitas dalam Pemilu 2019 : Proyeksi dan Efektivitas. *Centre For Strategic And International Studies*, 1, 1–10.
- Fikri, D., & Sukmajati, M. (2019). Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia : Penguatan Demokrasi Patronase ? *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 3(1), 75–95. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.398>
- Hanafi, A. (1995). *Pengantar Theologi Islam*. Mutiara Sumber Widya.
- Kita, A. (2019). *Parade Ahlussunnah: Ini 12 Tuntutannya*. Aceh Kita. <https://www.acehkita.com/parade-ahlussunnah-ini-12-tuntutannya/>
- Latif, H. M. (2007). Tradisi dan Vitalitas Dayah (Kesempatan dan Tantangan). *Didaktika*, 8(2), 1.
- Lhokseumawe, U. (2018). *The Social Role of Ulama Dayah to Aceh Society , Indonesia*. 23(1), 18–24. <https://doi.org/10.9790/0837-2301051824>
- Mulyana Idris, & Muhammad Sahlan. (2018). Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi. *Substantia*, 20(11), 83–85.
- Muslimin, A. M. (2014). Politik Penyetaraan Dayah di Aceh. *Jurnal Tribakti*, 25(2), 409.
- Nurrohman Syarif dan Marzuki Wahid. (2018). Politik Formalisasi Syari'at Islam dan Fundamentalisme: kasus Nanggroe Aceh Darussalam. *KONTROVESI*

PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA. (Buku) .

- Sebastian, L. C., & Arifianto, A. R. (2018). *From Civil Islam towards NKRI Bersyariah? Understanding Rising Islamism in Post-Reformasi Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.65>
- Serambines. (2015). *Ini Dia 'Umar bin Khattab' Akhir Zaman*. Serambi News. <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/ini-dia-umar-bin-khattab-akhir-zaman>
- Wildan, M. (2016). Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia. In *Setelah "Bela Islam": Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial* (p. 188). Maarif.
- Wilson, I. (n.d.). *Ian Wilson, Main Hakim Sendiri dan Militansi Islam Populis di Indonesia Studi Kasus Front Pembela Islam (FPI)*. Indo Progress.
- Wilson, I. D. (2018). *Politik Jatah Preman*. Marjin Kiri.